

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bagian kesimpulan ini merangkum keseluruhan temuan utama mengenai cara detikJatim membingkai pendemo dalam peristiwa Demonstrasi Tolak Undang-undang TNI di Surabaya pada 24 Maret 2025 melalui artikel-artikel yang telah dipublikasikannya. Peneliti menggunakan empat aspek analisis *framing* model Robert M. Entman sebagai pisau bedah untuk melihat bagaimana detikJatim menonjolkan aspek dan menyeleksi isu pada artikel-artikel beritanya.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, detikJatim terbukti melakukan pembedaan dalam memberitakan pendemo pada peristiwa Demonstrasi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia di Surabaya pada 24 Maret 2025 dengan menonjolkan isu dan menyeleksi aspek-aspek tertentu dalam pemberitaannya. Dilihat dari jumlah atau kuantitas, berita yang dipublikasikan detikJatim memiliki jumlah yang banyak, namun cenderung membingkai pendemo dengan hal-hal yang bersifat negatif seperti sebagai pelaku pengrusakan, anarkisme, dan penyebab kerusuhan pada demonstrasi. Hal ini tidak sesuai dengan teori tanggung jawab sosial pers yang seharusnya media massa memiliki tanggung jawab besar baik secara moral dan sosial terhadap masyarakat yang menjadi konstituennya.

Kemudian, hasil analisis *framing* yang dilakukan oleh peneliti terhadap 24 artikel yang diterbitkan oleh detikJatim terkait Demonstrasi Tolak UU TNI di Surabaya pada 24 Maret 2025 diketahui bahwa:

1. ***Define Problem*** atau definisi masalah yang dilakukan detikJatim adalah memberikan informasi terkait dengan aksi berjalannya demonstrasi di Gedung Negara Grahadi dari mulai pra, saat, hingga selesainya demonstrasi. Isu yang diseleksi oleh detikJatim adalah proses berjalannya demonstrasi, sementara penonjolan aspeknya adalah adanya keributan yang terjadi pada demonstrasi tersebut.
2. ***Diagnose Cause*** atau identifikasi penyebab masalah yang dilakukan detikJatim adalah sebagian kecil berupa aksi demonstrasi disebabkan oleh

masyarakat yang kecewa akan adanya pengesahan UU TNI yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sementara sebagian besar yaitu kericuhan demonstrasi disebabkan oleh para pendemo yang melakukan aksi anarkisme. Seleksi isu yang dilakukan oleh detikJatim dalam mengidentifikasi penyebab masalah yaitu aksi demonstrasi dan adanya kerusuhan di dalam demo tersebut, sementara penonjolan aspeknya lebih banyak tentang pendemo yang menjadi penyebab kerusuhan.

3. ***Make Moral Judgement*** atau penilaian moral yang ditampilkan oleh detikJatim lebih dominan pendemo sebagai pelaku kerusuhan, bukan masyarakat yang sedang menyuarkan aspirasinya. Media detikJatim terlihat melakukan seleksi isu yang lebih banyak mengunggah artikel dengan isi pendemo sebagai pelaku kerusuhan dengan polisi sebagai korbannya. Penonjolan aspek yang dilakukan adalah menarasikan dengan begitu jelas terkait aksi-aksi anarkisme pendemo hingga menyebabkan korban dari pihak kepolisian yang sedang bertugas.

4. ***Treatment Recommendation*** atau rekomendasi penyelesaian masalah yang dilakukan detikJatim hampir seluruhnya berasal dari pihak kepolisian, seperti penggunaan mobil water cannon untuk mengondisikan pendemo ricuh, pengalihan arus lalu lintas, hingga penyisiran sisa pendemo setelah bubar. Hal ini jelas menunjukkan detikJatim menyeleksi isu bahwasannya masalah yang ditimbulkan dari aksi demonstrasi diselesaikan oleh penguasa, serta menonjolkan aspek bahwa penguasa sebagai pihak yang menyelesaikan masalah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan jika *framing* yang dilakukan detikJatim terhadap pendemo dominan *framing negatif*, karena detikJatim menyudutkan pendemo lewat narasi-narasi kekerasan seperti penyebab kerusuhan, pelaku anarkisme, pengrusakan fasilitas umum, menyebabkan kemacetan, yang dilakukan saat demonstrasi. Media detikJatim tidak memberikan ruang yang besar bagi pendemo untuk menyampaikan aspirasinya melalui media dan cenderung berpihak kepada pihak penguasa karena sudut pandang yang ditampilkan dalam pemberitaannya dominan menjadi corong penguasa lewat aparat yang bertugas melakukan pengamanan demonstrasi.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi teoritis, penelitian ini dilakukan secara mendalam menggunakan teori *framing*, *social responsibility of the pers*, dan *second level of agenda setting* sebagai pisau bedah untuk menelaah lebih dalam tentang pembingkaihan yang dilakukan oleh media dengan metode analisis framing Robert Entman. Teori dan metode serupa dapat digunakan untuk penelitian dengan tema yang sama pada isu-isu yang berbeda untuk mendapatkan temuan bagaimana media massa melakukan pembingkaihan dalam pemberitaan yang dipublikasikan.
2. Rekomendasi praktis, bagi perusahaan media massa dan para pekerjanya, disarankan untuk terus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap konstituen yakni masyarakat sehingga artikel berita yang diberikan dapat membawa dampak baik bagi demokrasi dengan menerbitkan berita yang menyeluruh dan tidak berat sebelah.
3. Rekomendasi sosial, karena tidak semua media berpihak kepada demokrasi dan masyarakat serta media secara aktif melakukan pembingkaihan, maka masyarakat harus semakin kritis dalam mengonsumsi berita dari media massa. Ketika mencermati informasi seputar peristiwa yang sedang terjadi melalui sebuah media massa, diharapkan untuk memeriksa kembali informasi tersebut lewat media massa yang lain (jangan menggunakan sumber tunggal).

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki subjek pada 24 berita mengenai demonstrasi penolakan Revisi Undang-undang TNI di Surabaya yang diterbitkan oleh detikJatim hanya pada tanggal 24 Maret 2025 atau pada hari terjadinya demonstrasi. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk keseluruhan praktik pemberitaan pendemo demonstrasi

Undang-undang Tentara Nasional Indonesia di Surabaya dalam rentang waktu yang lebih luas pada media siber detikJatim.